

BAB IV

STRATEGI ADVOKASI ForBALI DALAM MENOLAK REKLAMASI TELUK BENOA

Dinamika sosial-politik Indonesia yang berkembang secara dinamis menjadikan gerakan sosial semakin memiliki posisi penting dalam ikut berkontribusi atau mengawasi penerapan kebijakan-kebijakan publik. Salah satunya social movement yang memiliki peranan penting di Indonesia, khususnya di wilayah Bali adalah ForBALI.

Keberadaan ForBALI sejak tahun 2013 telah menunjukkan sikap pro-aktifnya dengan menjalankan berbagai tindakan advokasi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk entitas-entitas transnasional. Adanya persamaan tentang upaya pelestarian lingkungan hidup (*global environment*) dan melindungi kultur, kedaulatan (*sovereignty*) dari masyarakat Bali menjadi titik temu atas munculnya berbagai dukungan terhadap ForBALI tersebut. Pada bab IV ini akan diuraikan lebih lanjut tentang berbagai upaya/advokasi yang dilakukan ForBALI dalam menolak reklamasi Teluk Benoa dengan menggunakan teori Transnational Advocacy Networks, yang meliputi advokasi pada aspek *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, serta *Accountability Politics*.

A. Advokasi Melalui *Information Politics*

Strategi *Information Politics* ini dapat digunakan anggota dari sebuah jaringan yang bertujuan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas secara cepat tentang isu yang sedang diangkat sehingga dapat membuat masyarakat terpengaruh dengan isu tersebut dan dapat memperkuat dari gerakan itu sendiri. Dalam kasus ini, gerakan ForBALI sangat rajin dalam memperluas jaringannya baik didalam negeri maupun diluar negeri, salah satunya gerakan ForBALI selalu menyuarakan dan menginformasikan tentang penolakan reklamasi Teluk Benoa tersebut, dan juga

menampilkan kegiatan mereka dalam upaya menolak proyek reklamasi tersebut²¹.

Untuk memperluas jaringannya, gerakan ini memberikan informasi kepada masyarakat luas yang berada jauh dari jangkauan mereka tentang apa itu proyek reklamasi yang terjadi di Teluk Benoa, alasan mereka menolak proyek reklamasi tersebut, tentang perbedaan antara realita, kajian yang dibuat oleh pihak investor, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang sangat berbeda, dan juga informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang isi maupun arah dari kebijakan pemerintah Indonesia yang mereka anggap bertentangan dengan banyak faktor. Strategi *Information politics* ini juga digunakan oleh gerakan ForBALI beserta aliansinya untuk menambah anggota, suara dan untuk memperkuat jaringan mereka.

Sosial media bagi sebuah gerakan sosial, merupakan alat yang cukup berguna bagi mereka saat ini. Anggota dari gerakan tersebut dapat mencurahkan opininya melalui sosial media mereka, begitu juga dari gerakan itu sendiri akan menyampaikan opini mereka tentang isu yang mereka angkat, dan melalui kekuatan sosial media mereka menyampaikan tujuan dari pergerakan mereka terhadap isu yang sedang mereka angkat. Selain berguna untuk menyampaikan tujuan mereka, sosial media juga dapat membentuk opini publik dan merubahnya sebagai kekuatan bagi mereka. Berbagai informasi yang sudah mereka sebarakan melalui sosial media mereka secara tidak langsung dapat mempengaruhi orang sekitarnya, dan juga orang luas yang memiliki tujuan yang sama seperti mereka, sehingga mereka yang terpengaruh dengan pemikiran tersebut bersatu dan menciptakan kekuatan baru ataupun menambah kekuatan bagi sebuah gerakan ataupun kelompok yang memiliki tujuan yang sama²².

²¹ Margareth E. Keck and Katryn Sikink, *Transnational and Advocacy Network*, Routledge Publishing, New York, 1999, hal.47.

²² *Ibid.*

1. Pemanfaatan Media Internet

Pada zaman sekarang ini sosial media juga dapat memobilisasi sebuah gerakan untuk melakukan aksi ataupun lainnya, dan juga opini publik yang tercipta dari sosial media tersebut dapat menjadi sebuah kekuatan, tidak menutup kemungkinan juga kekuatan dari opini publik tersebut yang dapat memobilisasi individu menjadi kelompok dan juga gerakan dapat melampaui kekuatan dari pemerintah setempat, ataupun pemerintah negara meskipun belum mampu merubah isu publik menjadi sebuah isu politik terutama di Indonesia. Sosial media juga tidak terbatas dengan gender, usia, warna kulit, jabatan dan juga sosial media dapat melampaui batas negara sehingga semakin banyak yang setuju dengan sebuah pendapat baik itu dari individu maupun sebuah gerakan sosial, maka semakin kuat juga jaringan dari gerakan tersebut. Meskipun tidak semua individu ataupun anggota yang berada di dalam jaringan tersebut dapat membantu terjun di lapangan secara langsung, mereka dapat membantu melalui suara mereka melalui sosial media mereka yang sebatas untuk menyemangati, *mem-blow up* isu tersebut, dan juga dapat membantu pendanaan dari gerakan tersebut.

Dalam kasus ini gerakan ForBALI sangat memanfaatkan kemajuan teknologi dalam melakukan strategi ini. ForBALI sangat gencar meng-upload kegiatan mereka dalam website mereka yaitu *www.ForBALI.org*, yang dimana terdapat banyak artikel yang menjelaskan perkembangan pergerakan mereka, perkembangan tentang proyek reklamasi tersebut, dan segala yang berhubungan dengan proyek reklamasi tersebut. Gerakan ini juga selalu menyuarakan suara mereka lewat sosial media mereka seperti; *Twitter*, *Facebook*, *Instagram* milik mereka dan juga terus memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang janggalnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang

bertentangan dengan realita yang ada. Seperti salah satu contoh dimana pada tahun 2013 mantan presiden Indonesia yang sengaja mengundang salah satu pemain sepak bola terkenal yaitu Cristiano Ronaldo yang ditunjuk sebagai duta penanaman bakau di Teluk Benoa pada event ‘Peduli Mangrove’ pada 26 Juni 2013²³.

ForBALI beserta jaringannya melakukan “bom *tweet/retweet*” melalui akun Twitter mereka dengan membuat tweet semacam surat terbuka pada Cristiano Ronaldo dengan *mention* akun @cristiano dan menggunakan *hashtag* #cr7fooled. Hal ini karena disaat Cristiano Ronaldo ditunjuk sebagai duta penanaman bakau pada event tersebut, sesungguhnya Surat Keputusan (SK) tentang reklamasi sudah diterbitkan oleh pemerintah Bali. Meskipun tidak ada tanggapan resmi dari Cristiano Ronaldo tentang kasus tersebut, setidaknya “bom *tweet/retweet*” tersebut dapat menjadi tersebar luas dan menjadi perbincangan hangat oleh para netizen di sosial media²⁴.

ForBALI juga turut membuat petisi online melalui situs *www.change.org* yang berisi tentang tuntutan untuk pemerintah daerah Bali untuk mencabut SK reklamasi di Teluk Benoa dan juga untuk presiden Indonesia untuk segera mencabut Perpres No 51 Tahun 2014 yang dianggap melanggar Perpres No 45 Tahun 2011. Selain petisi yang dibuat oleh ForBALI banyanya *website* asing yang juga turut ikut memberitakan tentang permasalahan proyek reklamasi di Teluk Benoa yang sangat membantu bagi ForBALI dalam menyebarkan isu yang mereka angkat dengan hadirnya bantuan dari website asing tersebut.

²³ “ForBali: E Paper KMB”, dalam https://issuu.com/epaper-kmb/docs/edisi_25_nopember_2016, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017.

²⁴ *Ibid*,

Gerakan ForBALI dapat dikatakan salah satu gerakan yang cukup menarik, karena gerakan ForBALI ini berawal dari sosial media saja namun dapat menjadi gerakan nyata dan dapat bertahan hingga sekarang ini. Selain mereka selalu menyuarakan melalui sosial media mereka, tapi mereka juga melakukan long-march pada Selasa, 17 juni 2014 secara damai dari Lapangan Parkir Timur Renon menuju depan Kantor Gubernur Bali, massa juga sempat berhenti dan berorasi di depan Bank Artha Graha Renon milik Tommy Winata. Aksi ini awalnya dimobilisasi melalui sosial media mereka dan dapat berhasil mengumpulkan ribuan massa²⁵. Aksi nyata tersebut berlangsung secara konsisten pada setiap bulannya. Tidak sedikit juga website luar negeri yang juga ikut memposting tentang keadaan yang terjadi di Bali saat ini yang berhubungan dengan permasalahan proyek reklamasi tersebut.

2. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak

Pemuda Desa Pekraman Lebih, Gianyar mendirikan Baliho penolakan reklamasi Teluk Benoa di dua titik, masing-masing di perempatan Desa Lebih – Jl. Bypass IB. Mantra dan di depan Balai Pesanekan Pantai Lebih. Pendirian Baliho ini untuk memaknai kemenangan dharma melawan adharma sebagaimana makna Galungan. Pemasangan Baliho mereka lakukan pada dini hari 31 Oktober 2017²⁶.

Seperti yang disampaikan I Wayan Agus Muliana sebagai Koordinator Pemuda BTR Desa Lebih, pendirian Baliho kali ini selain untuk menunjukkan konsistensi

²⁵ I Gusti Agung Ayu Kade Galuh, “Media Sosial sebagai Strategi Gerakan Bali Tolak Reklamasi” Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 13 Nomor 1, 2016 diakses pada 25 Maret 2017

²⁶ “Memaknai Kemenangan Dharma Dengan Mendirikan Baliho Tolak Reklamasi”, dalam <http://www.forBali.org/id/memaknai-kemenangan-dharma-dengan-dirikan-Baliho-tolak-reklamasi/>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2017.

Desa Pekraman Lebih juga sebagai simbolis bahwa kemenangan Dharma atas Adharma dalam menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan harus diperjuangkan. Selengkapnya Wayan Muliana menyatakan bahwa :

“...Kita tidak bisa berdiam diri untuk mengalahkan Adharma, salah satunya berupa sifat rakus manusia yang memaksakan kehendak untuk mengurug Teluk Benoa. Perjuangan menolak reklamasi Teluk Benoa membutuhkan konsistensi, jangan sampai lengah, di saat rakyat Bali sibuk dengan kegiatan adat dan memperingati hari raya kita harus tetap waspada terhadap manuver-manuver yang dilakukan pereklamasi.”²⁷

Pendirian Baliho menjadi aktivitas ForBALI sebagai bagian dari promosi media cetak yang dapat langsung dibaca oleh khalayak. Sejak tahun 2014 beberapa Baliho yang secara berhasil dipasang oleh jaringan ForBALI adalah sebagai berikut :²⁸

- a. Pemasangan Baliho di 9 titik di wilayah Kota Denpasar.
- b. Pemasangan Baliho di 6 titik di wilayah Kabupaten Buleleng.
- c. Pemasangan Baliho di 4 titik di wilayah Kabupaten Jembrana.
- d. Pemasangan Baliho di 7 titik di wilayah Kabupaten Karangasem.
- e. Pemasangan Baliho di 6 titik di wilayah Kabupaten Bangli.

Kemudian penyebarluasan informasi kegiatan ForBALI juga dijalankan pada pemberitaan media cetak. Meskipun tidak ada kerjasama secara khusus, berupa nota

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Laporan, “Kegiatan ForBali Periode 2014-2017”, Buletin ForBali, Cetakan keXII, Denpasar, 2017, chapter vi.

kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara ForBALI dengan surat kabar, namun beberapa pemberitaan dan diterbitkannya opini-opini dari aktivis hingga masyarakat secara luas telah berhasil meningkatkan kapasitas agenda penolakan reklamasi Teluk Benoa. Beberapa surat kabar yang menyuarakan penolakan reklamasi Teluk Benoa, diantaranya :²⁹

- a. Surat Kabar Kompas yaitu surat kabar nasional yang memberitakan penolakan reklamasi Teluk Benoa sebanyak 24 kali dari periode 2013 hingga 2016.
- b. Surat Kabar Tempo yaitu surat kabar nasional yang memberitakan penolakan reklamasi Teluk Benoa sebanyak 16 kali dari periode 2013 hingga 2016.
- c. Surat Kabar Republika yaitu surat kabar nasional yang memberitakan penolakan reklamasi Teluk Benoa sebanyak 7 kali dari periode 2013 hingga 2016.
- d. Surat Kabar Tribun Bali yaitu surat kabar regional Bali yang memberitakan penolakan reklamasi Teluk Benoa sebanyak 12 kali dari periode 2013 hingga 2016.
- e. Surat Kabar Radar Bali yaitu surat kabar regional Bali yang memberitakan penolakan reklamasi Teluk Benoa sebanyak 9 kali dari periode 2013 hingga 2016.

B. Advokasi Melalui *Symbolic Politics*

Strategi *Symbolic Politics* ini pada anggota dari jaringan juga memberikan informasi tentang isu yang sedang diangkat oleh mereka kepada masyarakat luas melalui simbol-simbol, tanda-tanda, maupun momen-momen tertentu. Dalam melakukan strategi ini biasanya sebuah gerakan, maupun NGO melakukannya ditanggal-tanggal tertentu yang berhubungan dengan isu yang sedang mereka angkat, selain memperingati ditanggal tertentu mereka juga mereka membuat kegiatan tertentu yang menggambarkan tentang isu yang mereka angkat, ditambah lagi banyak dari mereka yang membuat

²⁹ *Ibid.*

tulisan maupun artikel tentang isu yang mereka angkat. Tujuan dari mereka melakukan strategi ini selain untuk memberitahu tentang isu yang mereka angkat, mereka juga bertujuan untuk menarik perhatian pihak-pihak tertentu yang posisinya berada jauh dari ruang lingkungannya. Meskipun terlihat hampir sama dengan strategi *Information Politics* secara sekilas, strategi ini bisa dikatakan jauh lebih dalam daripada strategi *Information Politics*.

Gerakan ForBALI dalam menjalankan strategi ini sudah melakukan banyak cara. Gerakan ForBALI bersama jaringannya yang terdiri dari pemuda desa, kepala adat, pemuka agama, organisasi mahasiswa, NGO, seniman, musisi, dan lain lain membuat dan mengikuti beberapa aksi baik didalam negeri maupun diluar negeri dengan memanfaatkan jaringannya. Gerakan ini gencar membuat Baliho, maupun poster tentang penolakan mereka terhadap proyek reklamasi tersebut. Tidak sedikit juga banyak Baliho yang mereka buat dihancurkan oleh aparat maupun oknum tertentu. Para pemuda desa yang tergabung dalam STT (Sekaa Teruna Teruni) juga sering bergabung dalam acara-acara di desa mereka seperti memperingati hari jadi desa mereka dengan menampilkan pertunjukan seni dan juga membagikan atribut-atribut tentang penolakan terhadap proyek reklamasi Teluk Bena.

Beberapa aksi keterlibatan kelompok masyarakat dalam mendukung program penokakan reklamasi Teluk Bena diantaranya diwujudkan dalam beberapa aksi unjuk rasa, diantaranya :

- a. Penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Bena terus meluas. Setelah sebelumnya melakukan aksi damai di depan kantor Gubernur Bali pada 26 Februari 2017, Desa Adat Jimbaran menggelar aksi damai di persimpangan Kali/ruwet (perempatan antara jalan raya uluwatu I -uluwatu 2 – jimbaran ke arah Ayana). Selain menggelar orasi, juga digelar deklarasi desa adat Jimbaran menolak reklamasi Teluk Bena. Selain itu

juga pemasangan Baliho dan orasi pengukuhan sikap. Setelah menggelar orasi, masa bersama-sama menuju *Quary land* Jimbaran, yang dilanjutkan dengan konser BTR baik seni tradisional maupun seni modern. Pada aksi ini, juga diisi pembentangan bendera raksasa 25 meter x 25 meter dari atas tebing sebagai wujud sikap desa adat Jimbaran menolak reklamasi Teluk Benoa. Bendesa adat Jimbaran, Made Budiarta dalam orasinya menegaskan bahwa Desa Adat Jimbaran, menolak rencana Reklamasi Teluk Benoa. Budiarta juga mengatakan, akan mencabut semua dukungan dalam bentuk apapun yang sudah di sepakati oleh Bendesa yang sebelumnya³⁰.

- b. Aksi penolakan reklamasi Teluk Benoa ini dilakukan bertepatan dengan pertemuan internasional *World Ocean Summit* (WOS) pada 23 Februari 2017 di Bali. Massa meminta agar pertemuan yang melibatkan sejumlah negara tersebut tidak ditunggangi kepentingan investasi-investasi destruktif yang justru akan merusak laut. Aksi tersebut melibatkan Pasubayan Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa serta ForBALI yang selama ini konsisten memperjuangkan penolakan reklamasi Teluk Benoa. Wayan Swarsa Selaku Koordinator Pasubayan Desa Adat Tolak Reklamasi Teluk Benoa yang hadir pada aksi tersebut mengatakan perwakilan adat Bali ingin menunjukkan bahwa ada komitmen kuat untuk menjaga laut dari upaya perusakan melalui investasi-investasi, seperti rencana reklamasi Teluk Benoa. “Masyarakat adat yang melawan proyek reklamasi Teluk Benoa ini tidak memiliki kepentingan apapun selain mempertahankan Teluk Benoa dari ancaman reklamasi yang akan

³⁰ “Desa Adat Jimbaran Tegaskan Tolak Reklamasi”, dalam <http://222.124.220.45/read/peristiwa/2017/02/26/75500/desa-adat-jimbaran-tegaskan-penolakan-reklamasi-teluk-benoa.html>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2017.

merusak lingkungan³¹. Dalam aksi ini, ForBali melakukan advokasi untuk menyuarkan tuntutan mereka dalam menggagalkan proyek reklamasi dan mendapatkan dukungan dari pihak luar yang memiliki power lebih besar.

Disetiap hari jadi Indonesia jaringan dari ForBALI juga melakukan aksinya, salah satu contohnya masyarakat Sanur melakukan Pawai Obor yang diikuti masyarakat, pemuda, dan Organisasi kemasyarakatan yang ada di Sanur. Pada aksi pawai tersebut semarak dengan kibaran atribut tentang penolakan reklamasi Teluk Benoa yang dibawa pemuda dari Desa Adat Intaran yang tergabung dalam Paguyuban STT Desa Adat Intaran. Selain itu jaringan gerakan ForBALI juga menggelar kegiatan yang bertemakan ‘Sanga Bhuana Art Event Bali Tolak Reklamasi 2015’ pada Minggu, 15 Desember 2015 di Pantai Padanggalak, Kesiman, Denpasar Timur. Pada kegiatan tersebut terdiri dari lembaga, komunitas, seniman, mahasiswa, pelajar dan individu yang tergabung dalam jaringan gerakan ForBALI. Aksi tersebut dimeriahkan oleh musisi lokal, seni tradisional bondres, tari tradisional dari berbagai STT di Bali, serta teater. Uniknya lagi dalam kegiatan ini dibuatnya patung kepalan tangan kiri setinggi 13 meter yang menggambarkan simbol perlawanan rakyat Bali terhadap rencana reklamasi tersebut³². Superman is Dead adalah band tanah air yang cukup terkenal di Indonesia dan juga salah satu anggota dari jaringan tersebut yang juga gencar menyuarkan dan memberitahu kepada penonton dan fan-base mereka melalui konser yang mereka ikuti maupun yang mereka selenggarakan. Sebagai salah satu anggota jaringan

³¹ “WOC Diminta Tidak Ditunggangi Kepentingan Investor”, dalam <http://222.124.220.45/read/headline/2017/02/24/75359/woc-diminta-tak-ditunggangi-kepentingan-investor.html>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2017.

³² “Sanga Bhuana Art Event Bali Tolak Reklamasi 2015”, dalam <http://www.nusaBali.com/index.php/berita/1198/sanga-bhuana-art-event-Bali-tolak-reklamasi-2015> diakses pada 12 Desember 2017

mereka benar-benar serius menyebarkan isu lingkungan ini agar masyarakat luas mengetahui permasalahan yang sedang terjadi di Teluk Benoa.

Kemudian *Symbolic politics* selanjutnya juga disuarakan ForBALI dengan menggandeng musisi Iwan Fals. Dalam wawancara ForBALI November 2013. Iwan ke Bali, ikut mendukung gerakan ForBALI menolak rencana reklamasi. Iwan khawatir jika Teluk Benoa direklamasi. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana nasib hutan mangrove jika area itu disulap menjadi hotel dan lokasi hiburan lain. Iwan menghawatirkan nasib nelayan yang turun temurun mencari rezeki di Teluk Benoa. Belum lagi biota laut bakal terancam. Iwan Fals juga menyatakan bahwa :

*“Saya sempat berbincang dengan supir saya dan banyak orang soal rencana reklamasi Benoa. Sangat menyedihkan jika itu terjadi. Saya bangga dengan anak-anak muda yang menolak reklamasi tanpa berbuat anarkis. mengapresiasi anak-anak muda yang melakukan gerakan penolakan. Semoga gerakan ini tetap terus dan tambah kuat”*³³

Dari keterlibatan kalangan artis dan seniman di atas maka agenda penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa mengalami peningkatan kapasitas dari isu social developing menjadi isu political developing. Keterlibatan artis dan seniman yang sebenarnya berada diluar jaringan pengambilan keputusan ternyata dianggap sebagai pihak yang netral yang tidak memiliki kepentingan atas isu ini, kecuali untuk mendukung penyelamatan kelestarian lingkungan pesisir dan hak masyarakat Bali. Inilah yang menjadikan ForBALI mengalami perkembangan yang pesat sebagai gerakan sosial.

³³ “Iwan Fals Tolak Reklamasi”, dalam <http://www.mongabay.co.id/2014/06/16/iwan-fals-tolak-reklamasi-teluk-benoa/>, diakses paa tanggal 23 November 2017.

Tidak hanya didalam negeri saja ForBALI melakukan strategi *Symbolic politics*, mereka juga melakukannya diluar negeri. Seperti yang dilakukan oleh 3 aktivis ForBALI pada tanggal 10 Desember 2015 lalu, yakni Dadang SH Pranoto yang juga gitaris band Navicula dan juga sebagai vokalis Dialog Dini Hari (DDH), ditemani oleh Fadlik Al-Iman, dan Anton Muhajir dari pewarta warga. Selain tiga anggota ForBALI tersebut, turut hadir juga beberapa simpatisan ForBALI termasuk Daniel Price yaitu seorang peneliti yang bersepeda dari Kutub Selatan ke Paris untuk mengampanyekan perubahan iklim. Dalam aksinya, anggota ForBALI membentangkan beberapa poster dengan tulisan *Bali Not for Sale*, *Bali Tolak Reklamasi*, *Protect Benoa Bay*, dan seterusnya. Mereka membentangkan poster-poster tersebut di pintu masuk *Green Zone*, yaitu kawasan bagi sebagian delegasi masyarakat sipil dalam COP 21 melakukan pertemuan-pertemuan. Aksi tersebut mendapat respon positif dari para pengunjung, ada beberapa dari mereka yang bertanya tentang tuntutan aksi tersebut, dan ada pula yang hanya sekedar untuk memfoto. Selain di pintu masuk *Green Zone*, aksi tersebut juga dilakukan di depan *Blue Zone*, yaitu kawasan inti di *Le Bourget* Paris Timur yang di mana pemimpin dunia lebih dari 140 negara dan 40.000 partisipan hadir dalam COP 21.

Aksi dari ForBALI dalam COP 21 memberi ciri tersendiri bagi mereka, sebelumnya aksi serupa dilakukan oleh aktivis WALHI dan *Friends of the Earth* (FoE) di *Blue Zone*. Mereka menampakan tuntutan yang sama yaitu tentang perlunya konservasi dan perlindungan kawasan Teluk Benoa dari eksploitasi termasuk rencana pembangunan fasilitas pariwisata baru. Selain membentangkan poster-poster di pintu masuk, anggota ForBALI juga melakukan pawai keliling ratusan booth di kawasan tersebut sambil menyanyikan Bali Tolak Reklamasi. Pada hari yang berbeda, di tempat lain, dan masih terkait dengan COP 21, Dadang juga ikut tampil di *Point Ephemere* pada 8 Desember 2015, di restoran dan kafe

di tepi sungai Saint-Martin, yang dimana tempat tersebut adalah tempat para aktivis masyarakat adat berkumpul.³⁴

Karena kuatnya ForBALI dalam menjalankan strategi *Information Politics*-nya dalam advokasinya, selain dapat menekan pemerintahan Indonesia, ForBALI juga dapat menambah kekuatannya berupa dukungan dari warga Bali yang berada di Tokyo, Jepang yang anggotanya terus meningkat dari tahun ke tahun dan terus memberi dukungan terhadap gerakan ForBALI untuk menentang Proyek Reklamasi di Teluk Benoa³⁵.

Tidak hanya warga Bali yang berada di Jepang, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Shizuoka Jepang, melakukan aksi damai di Aoba Koen, depan Balai Kota Shizuoka Jepang pada 10 Mei 2015 yang diikuti sekitar 60 orang. Dalam melakukan aksinya, mereka membentangkan spanduk “Tolak Reklamasi Teluk Benoa” dan beberapa peserta aksi mengenakan pakaian penari Bali sebagai tanda peduli mereka terhadap pulau Bali yang sedang dilanda isu Reklamasi di Teluk Benoa. Sebelumnya, sekelompok masyarakat Indonesia di Amerika Serikat juga menggelar aksi pada 11 April 2015 tentang penolakan terhadap proyek reklamasi di Teluk Benoa di depan gedung parlemen AS, *The Capitol Hill*³⁶.

Selain di *The Capitol Hill*, kelompok solidaritas yang terdiri dari masyarakat Indonesia yang berdomisili di Negara

³⁴ “Aktivis ForBALI KemBali Beraksi di COP 21” dalam <http://www.forBali.org/id/aktivis-forBali-kemBali-beraksi-di-cop-21/> diakses pada 30 November 2017

³⁵ “Warga Bali di Jepang Rayakan Nyepi dan Protes Reklamasi Teluk Benoa” dalam <http://www.tribunnews.com/internasional/2016/03/14/warga-bali-di-jepang-rayakan-nyepi-dan-protos-reklamasi-teluk-benoa> diakses pada 30 November 2017

³⁶ “Setelah Washington DC, Aksi Tolak Reklamasi Teluk Benoa Bergema di Jepang” dalam <http://www.balisaja.com/2015/05/setelah-washington-dc-aksi-tolak.html> diakses pada 30 November 2017

bagian California bersama orang-orang Amerika lainnya juga melakukan aksi berupa aksi solidaritas Internasional terhadap persoalan yang terjadi di Bali. Bagi mereka proyek tersebut tidak hanya meresahkan orang-orang yang berada di Bali saja, namun juga orang-orang Indonesia yang berada di Amerika. Aksi tersebut dilakukan disaat Presiden Indonesia, Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Diaspora Indonesia di Amerika Serikat di *Palace of Fine Art Theater*, San Fransisco pada tanggal 16 Februari 2016³⁷.

Dukungan pun turut diberikan dari Akademisi Muda Bali (Amuba) yang terdiri dari mahasiswa asal Bali yang sedang belajar di Australia pun turut memberikan penolakan terhadap proyek reklamasi di Teluk Benoa. Amuba sendiri bukan hanya terdiri dari mahasiswa saja melainkan terdapat jaringan dosen, pengajar, guru, peneliti, dan cendekiawan yang tersebar di Bali maupun diluar Bali, baik secara geneakolis (kelahiran) maupun secara psikologis (Kejiwaan)³⁸.

Dukungan-dukungan berupa aksi maupun demonstrasi yang dilakukan oleh ForBALI dan juga oleh bantuan aliansinya adalah hasil kuatnya strategi advokasi *Information Politics* yang dilakukan oleh ForBALI.

C. Advokasi Melalui *Leverage Politics*

Leverage politics merupakan bagian dari konsep TAN yang memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan dari kinerja aktor advokasi. Melalui langkah ini, aktor advokasi akan memfungsikan jaringan organisasinya untuk mengembangkan isu, menyebarluaskan ide dan gagasan

³⁷ “Seruan Tolak Reklamasi Benoa Dibentangkan di Amerika Serikat” dalam <http://www.tribunnews.com/regional/2016/02/17/seruan-tolak-reklamasi-benoa-dibentangkan-di-amerika-serikat> diakses pada 30 November 2017

³⁸ “Akademisi Muda Bali di Australia Tolak Reklamasi Teluk Benoa” dalam https://www.detik.com/news/australia-plus-abc/3149622/akademisi-muda-bali-di-australia-tolak-reklamasi-teluk-benoa?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C35515711 diakses pada 30 November 2017

untuk kemudian masuk ke sasaran utama yaitu menggalang kekuatan (*collecting entity*) untuk dapat memperkuat kekuatan. Sydney G. Tarrow mengemukakan bahwa :

*“...penggalangan kekuatan dari sebuah organisasi masyarakat sangat ditentukan oleh kondisi yang berkembang, serta isu yang diusung oleh organisasi tersebut. Nantinya akan dicapai persamaan kepentingan untuk merehabilitasi kebijakan, menghapus hingga menggulingkan sebuah rezim penguasa melalui pembangunan civil power dan civil supremations.”*³⁹

Upaya dalam menyebarluaskan ide dan gagasan dalam penyelamatan Telok Benoa dijalankan ForBALI dengan memfasilitasi aksi demonstrasi di Istana Negara Jakarta pada 22 Januari 2014. Gerakan menolak rencana reklamasi Teluk Benoa, berlanjut ke Jakarta. Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI), menggelar aksi demo di depan Istana Presiden, Jakarta. Massa yang terdiri dari para aktivis lingkungan ini mendesak pemerintah pusat menghentikan segala upaya memuluskan proyek reklamasi Teluk Benoa, termasuk Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan mensiasati melalui tata ruang wilayah. Dalam situasi darurat, dimana bencana ekologis telah meluas, kepemimpinan Presiden SBY didesak mengoreksi model pembangunan yang eksploitatif dan mengabaikan daya dukung lingkungan yang terbatas. Tolak reklamasi, untuk menyelamatkan kawasan pesisir di Indonesia⁴⁰.

Ketua WALHI Bali ini menegaskan, ancaman kerusakan wilayah pesisir akibat reklamasi bukan hanya menghancurkan kawasan sekitarnya, namun mengancam

³⁹ David S Meyer and Sidney G. Tarrow, *The Social Movement : Contentious Politics in New Century*, Rowman and Little Field, New York, 1998, hal.10.

⁴⁰ “Tolak Reklamasi ForBali Demo di Istana”, dalam <http://222.124.220.45/read/headline/2014/01/22/2613/tolak-reklamasi-forBali-berdemo-di-istana.html>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2017.

warga negara lain yang terdampak bencana ekologis. Dia mencontohkan, banjir di utara Jakarta dan banjir bandang di Manado, salah satunya disebabkan oleh proyek reklamasi. Karena itu, pihaknya tak ingin bencana serupa melanda Bali akibat reklamasi. Selama aksi di depan Istana, massa membentangkan sejumlah bendera ForBALI, termasuk tulisan menolak reklamasi. Mereka juga membuat petisi berisi kajian dan penolakan reklamasi⁴¹.

Kemudian mewujudkan advokasi dalam aspek *Leverage politics*, ForBALI juga berhasil membangun afiliasi dan kolaborasi dengan Greenpeace. Pada fase inilah persoalan reklamasi Teluk Benoa menjadi isu internasional yang semakin kuat. Greenpeace bermula dari sekelompok kecil orang yang memutuskan untuk bersama-sama memprotes pengujian nuklir di Amchitka, lepas pantai bagian barat Alaska. Setelah itu mereka melanjutkan untuk membentuk Green Peace dan kemudian melakukan kampanye dengan mengutamakan isu lingkungan. Salah satu prinsip dasar Green Peace adalah "*bearing witness*" - atau menjadi saksi dan merekam pengrusakan lingkungan dan mengembalikan hak-hak lingkungan.

Greenpeace Indonesia prihatin, menjelang dua tahun era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, upaya pemulihan, perlindungan dan pembangunan di wilayah pesisir cenderung salah arah, serta tidak menghormati sejumlah norma hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kenyataan ini semakin mengorbankan kelestarian lingkungan hidup, fungsi religi, adat dan sosial kawasan, serta keberlangsungan mata pencaharian warga dan nelayan setempat. Persoalan berkaitan dengan reklamasi Teluk Benoa dan Teluk Jakarta merupakan dua contoh carut marutnya agenda pembangunan pesisir, yang cenderung tidak berkelanjutan di Indonesia. Dalam dua kasus tersebut jelas terlihat sejumlah elit pemerintahan justru lebih berpihak dan cenderung menjadi

⁴¹*Ibid.*

“juru bicara” yang mewakili kepentingan pihak swasta pengembang kawasan⁴².

Berbagai upaya intimidasi dan percobaan kriminalisasi, yang untuk kesekian kalinya terjadi terhadap sejumlah aktivis dan warga penolak reklamasi Teluk Benoa, sangat patut membuat kita prihatin. Hal ini memperlihatkan bahwa mekanisme dan perangkat hukum di era pemerintahan saat ini masih saja mudah dibajak untuk memuluskan kepentingan pengusaha pengembang kawasan (PT. Tirta Wahana Bali Internasional) dalam menjalankan rencananya untuk memprivatisasi kawasan Teluk Benoa.

Tidak kalah memprihatinkan adalah pernyataan kontroversial akhir-akhir ini yang dilontarkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengenai Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta yang dapat dilanjutkan kemBali, sementara telah ada putusan PTUN Jakarta pada akhir Mei 2016 yang memerintahkan pencabutan Keputusan Gubernur DKI Jakarta 2238 Tahun 2014 terkait pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G kepada pengembang terkait (PT. Muara Wisesa Samudra).

Berkaitan dengan perkembangan terkini dari dua isu reklamasi di Teluk Benoa dan Teluk Jakarta tersebut, Greenpeace Indonesia dengan ini menyatakan sikap:⁴³

- a. Mendesak Presiden untuk segera membatalkan Peraturan Presiden 51/2014 yang jelas-jelas sarat kepentingan upaya reklamasi dan privatisasi Teluk Benoa atas dalih revitalisasi kawasan.

⁴² “Menyingkapi Persoalan Terkini Teluk Benoa dan Teluk Jakarta : Presiden Perlu Membatalkan”, dalam <http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Menyingkapi-Isu-Terkini-Teluk-Benoa-dan-Teluk-Jakarta--Presiden-Joko-Widodo-Perlu-Bersikap-Membatalkan-Rencana-Reklamasi/>, diakses paa tanggal 13 Oktober 2017.

⁴³ *Ibid.*

- b. Mendesak Presiden untuk segera menetapkan kebijakan penghentian menyeluruh agenda reklamasi di kawasan Teluk Jakarta, serta melakukan pemulihan fungsi ekologis kawasan pesisir dan perairan Teluk Jakarta tanpa pendekatan reklamasi.

Selain Greenpeace Indonesia menekan pemerintah Indonesia, ForBALI juga menekan pemerintah Indonesia melalui COP 21 di Paris. ForBALI yang didukung oleh WALHI dan *Friends of the Earth* melakukan aksi di *Green Zone* dan *Blue Zone* yang bertujuan menyampaikan tuntutan tentang perlunya konservasi dan perlindungan kawasan Teluk Benoa dari eksploitasi termasuk rencana pembangunan fasilitas pariwisata baru. Aksi yang dilakukan oleh ForBALI ini merupakan bentuk dari *Leverage Politics*, yang dimana ForBALI mengharapakan dukungan dari dunia Internasional melalui aksi tersebut. Sehingga tekanan bagi pemerintah Indonesia akan lebih besar.

Dukungan yang diberikan dunia internasional terhadap ForBali merupakan bentuk dari proses advokasi *moral leverage*, dimana Indonesia menjadi sorotan dunia internasional karena proses advokasi yang dilakukan ForBali dalam mengangkat isu kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan oleh proyek reklamasi Teluk Benoa menjadi isu internasional atau mendapat banyak sorotan dari masyarakat internasional.

D. Advokasi Melalui *Accountability Politics*

Accountability politics merupakan bagian dari konsep TAN dimana upaya aktor advokasi ini menekankan dalam pengawasan kinerja pemerintah. Dalam kondisi sebuah negara dengan sistem demokratis maka ini akan berdampak pada terbentuknya sistem pengawasan untuk membangun akuntabilitas dan transparansi yang menjadi prasyarat bagi *good government* dan *clean governance*. Untuk dapat menjadi pengawas, maka sebuah aktor advokasi harus memiliki struktur, fungsi dan visi-misi yang jelas agar dapat

memberikan pengawasan yang sistematis dan berkesinambungan.

Jika dikaitkan dengan advokasi dalam aspek *Accountability politics* yang dijalankan oleh ForBALI, maka upaya ini sebenarnya telah masuk dalam tujuan pembentukan (*institutional setting*) dari organisasi ini. Dari tahun 2013 hingga pertengahan 2017 setidaknya ForBALI telah menjalankan berbagai agenda dan tindakan nyata. Gambaran tentang hal ini lihat tabel 4.3. sebagai berikut :

Tabel 4.1 Implementasi Advokasi Dalam Konteks *Accountability Politics* ForBALI Periode 2013-2017

No.	Periode	Keterangan
1.	1 Januari 2013	ForBALI mulai fokus terhadap isu reklamasi Teluk Benoa yang rencananya akan digunakan sebagai sirkuit F1.
2.	3 Juli 2013	ForBALI mulai fokus terhadap isu reklamasi Teluk Benoa yang ternyata mendapat apresiasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3.	12 Agustus 2013	ForBALI berhasil mengapresiasi kepada DPRD Provinsi Bali untuk meninjau ulang proyek reklamasi Teluk Benoa.
4.	18 Oktober 2013	ForBALI melaporkan kasus reklamasi Teluk Benoa ke lembaga Ombudsman.
5.	Desember 2013	ForBALI berhasil mengajak warga Teluk Benoa untuk meolak reklamasi.

6.	Februari 2014	Greenpeace menyatakan penolakannya pada proyek reklamasi Teluk Benoa.
7.	Maret 2014- Januari 2015	Apresiasi dari Beberapa Organisasi Internasional terhadap penolakan reklamasi Teluk Benoa

Sumber : Diolah dari Koran, "Kegiatan ForBALI Periode 2014-2017", Buletin ForBALI, Cetakan keXII, Denpasar, 2017, chapter vi.

Melalui tabel di atas maka dapat dipahami bahwa langkah dan berbagai upaya ForBALI dalam menolak proyek reklamasi dijalankan secara berkelanjutan dan sistematis, yang pada akhirnya berhasil meraih apresiasi dari salah satu tokoh dunia. Inilah bentuk dari proses pengawasan kebijakan pemerintah oleh ForBali.

Pada akhirnya proyek reklamasi Telok Benoa Bali berhasil menjadi isu internasional. Salah satunya diungkapkan oleh Perdana Mentari Australia Malcolm Turnbull yang menyatakan : *"perlu kajian secara mendalam agar wilayah pesisir Teluk Benoa tidak rusak."*⁴⁴ Pernyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa dunia internasional memberikan perhatian atas proyek reklamasi ini yang dikhawatirkan dapat mengganggu kelestarian lingkungan, seperti yang menjadi kekhawatirkan ForBALI.

E. Hasil Advokasi ForBALI Dalam Penolakan Reklamasi Teluk Benoa

Sejak tahun 2013 hingga akhir tahun 2016, ForBALI berhasil mencapai berbagai pencapaian yaitu menghentikan reklamasi Teluk Benoa melalui solidaritas masyarakat Bali dan ketetapan yang berkekuatan hukum dari PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Hasil advokasi ForBALI yang telah menunjukkan berbagai keberhasilan juga didukung

⁴⁴ PM Australia Kunjungi Bali", *Kompas*, 8 November 2016.

oleh pernyataan Mohammad Bakir yang merupakan redaktur senior Kompas yang menyatakan bahwa :

“...persoalan reklamasi Teluk Benoa ternyata telah berkembang sebagai isu nasional, bukan hanya di Bali. Ini menunjukkan bahwa kelompok anti reklamasi semakin mendapat tempat dan tentunya semakin menjadi entitas yang dilibatkan dalam ,mencari solusi secara adil.”⁴⁵

Kemudian bentuk keberhasilan ForBALI lainnya dikemukakan oleh Wayan Gendo Suardana yang merupakan aktivis WALHI wilayah Bali yang menyatakan bahwa :

“...adanya upaya presekusi terhadap ForBALI tidak menyurutkan semangat perlawanan terhadap reklamasi Teluk Benoa, bahkan di akhir tahun 2014 dukungan dari masyarakat, hingga eksekutif daerah Bali semakin kuat. Ini menunjukkan ForBALI dan elemen-elemen terkait telah berhasil dalam melakukan advokasi Teluk Benoa.”⁴⁶

Bentuk keberhasilan dari ForBALI adalah pencabutan regulasi sebagai payung hukum penolakan reklamasi Teluk Benoa. 1 Agustus 2013, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar mengabulkan WALHI dengan memerintahkan SK Gubernur Nomor 1.051/03-L/HK/2012 tentang pemberian izin perusahaan pariwisata alam pada blok pemanfaatan kawasan taman hutan raya (Tahura) Ngurah Rai seluas 102,22 hektar kepada PT. Tirta Rahmat Bahari (PT. TRB) agar dicabut. Majelis hakim menyatakan, SK gubernur bertentangan dengan kebijakannya sendiri yaitu melanggar

⁴⁵ Mengkaji Sisi Lain Dari Reklamasi Teluk Benoa, *Kompas*, 9 November 2014.

⁴⁶ “Walhi Bali : Adil dan Lestari”, dalam <https://walhiBali.org/potret-lingkungan-hidup-Bali-bencana-dan-pembungkaman/>, diakses pada tanggal 11 Desember 2017.

surat edaran tanggal 27 Desember 2010 tentang moratorium (penghentian sementara) izin pembangunan akomodasi pariwisata di Bali Selatan. Hakim juga menyatakan gubernur dalam menerbitkan SK tersebut tidak terbuka kepada publik.

Hasil keputusan hakim PTUN itu adalah sebuah kemenangan kecil di tengah banyak kekalahan lingkungan Bali dari gempuran eksploitasi ekonomi yang mengabaikan nilai lestari, dan Gubernur Mangku Pastika sebagai “penjaga gawang” kebijakan di Bali justru berkali-kali “menjebol” gawangnya sendiri. Secara diam-diam juga, pada 26 Desember 2012 Gubernur Pastika menandatangani SK bernomor 2138/02-C/HK/2012 yang memberikan izin dan hak pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa kepada PT. Tirta Wahana Bali International (PT. TWBI). PT. TWBI diberikan hak pemanfaatan seluas 838 hektar dengan jangka waktu 30 tahun, dan dapat diperpanjang 20 tahun.

PT. TWBI akan membangun sebuah kawasan wisata terpadu yang dilengkapi tempat ibadah untuk lima agama, taman budaya, taman rekreasi sekelas Disneyland, rumah sakit internasional, perguruan tinggi, perumahan marina yang masing-masing dilengkapi dermaga yacht pribadi, perumahan pinggir pantai, apartemen, hotel, areal komersial, hall multifungsi, dan lapangan golf. SK Gubernur dengan dasar *feasibility study* dari Universitas Udayana yang belum final, tidak mencantumkan Undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum. SK Gubernur yang menggunakan UU no. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (WP3K) juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab seluruh pasal dalam UU itu yang berkaitan dengan hak pengusahaan perairan pesisir sudah dicabut karena bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian SK gubernur tentang reklamasi juga bertentangan dengan UUD 1945.

SK Gubernur juga melanggar Pasal 93 Peraturan Presiden (Perpres) no. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita, yang secara tegas menyatakan kawasan Teluk Benoa adalah kawasan konservasi. Dalam Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, pasal 2 (ayat 3) disebutkan reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut.

Gubernur Pastika sempat menutupi adanya SK tentang Reklamasi Teluk Benoa yang telah melabrak banyak aturan itu. Pada akhir Juni 2013 Pastika menyatakan belum tahu tentang rencana itu. Saat didesak tentang sudah beredarnya dokumen kajian oleh Universitas Udayana, barulah Pastika mengakui ada proposal dari PT. TWBI.

Rencana reklamasi di Teluk Benoa sangat mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan. Apalagi kawasan yang diberikan izin dan pemanfaatan itu adalah kawasan rawan bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, selatan Bali adalah salah satu dari tiga titik yang menjadi celah utama lokasi prediksi gempa megatrast yang dapat terjadi di wilayah selatan Indonesia. Celah lempeng tektonik di Bali selatan sewaktu-waktu bisa bergeser dan mengeluarkan tenaga guncang dahsyat berupa gempa bumi berkekuatan 8 hingga 9 skala richter, yang disebut gempa bumi Megathrust.

Melalui petisi tersebut ForBALI mendesak Gubernur Bali untuk tetap konsisten dan melaksanakan surat edaran moratorium izin akomodasi pariwisata di Bali selatan yang diterbitkannya sendiri pada 2010. Bali termasyhur sebagai pulau wisata karena alam dan budayanya. Menambah pulau buatan hasil reklamasi hanya akan membuat Bali terlihat tidak alami lagi dan berkurang martabatnya.

Selain dapat mencabut SK Gubernur Nomor 1.051/03-L/HK/2012 tentang pemberian izin perusahaan pariwisata alam pada blok pemanfaatan kawasan taman hutan raya

(Tahura) Ngurah Rai, ForBALI juga berhasil menyebarkan informasi tentang permasalahan yang terjadi pada Teluk Benoa pada saat ini yaitu tentang Proyek Reklamasi yang akan dilakukan di Teluk Benoa. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari banyaknya media sosial asing yang ikut berperan dalam memberikan informasi secara luas, seperti kajian yang diterbitkan oleh Conservation International (CI) tentang kajian modeling Teluk Benoa, dan juga banyaknya website luar negeri yang juga memberitakan tentang pergerakan dari ForBALI maupun permasalahan yang terjadi di Teluk Benoa seperti *www.theguardian.com*, *www.dw.com*, dan masih banyak lagi. Selain menyebarkan informasi secara luas, ForBALI juga membangun jaringan internasional untuk mendapatkan dukungan dunia internasional.